
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG OLEH MASYARAKAT SIPIL

2022-2023

Transparency International Indonesia adalah anggota gerakan global Transparency International yang memiliki satu visi: dunia di mana pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan kehidupan sehari-hari masyarakat bebas dari korupsi.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari Uni Eropa di bawah proyek “**Strengthening Accountability Networks among Civil Society**”, yang membantu warga biasa di 21 negara untuk mendorong akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Isi publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa atau gerakan Transparency International.



Funded by
the European Union



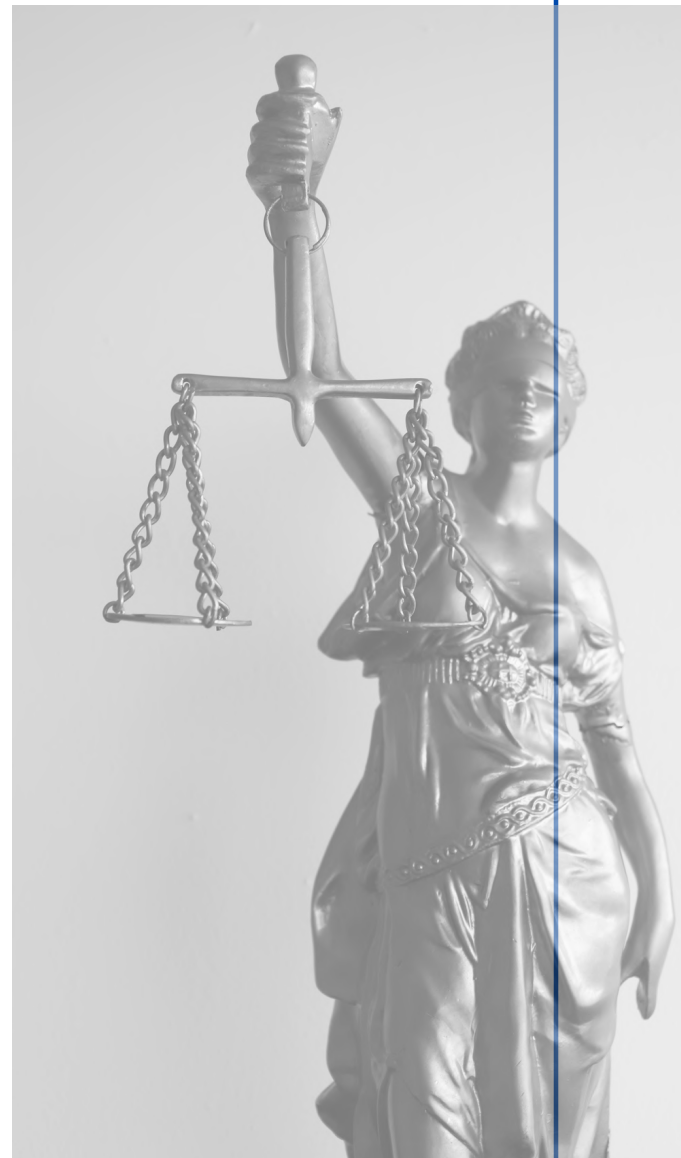
TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Laporan Hasil Pemantauan Rekam Jejak Calon Hakim Agung oleh Masyarakat Sipil

Penulis: Transparency International Indonesia
Kontributor: Koalisi Pemantau Peradilan dan Aliansi
Jurnalis Independen

Cover: Transparency International Indonesia

2023. Transparency International Indonesia. Except where otherwise noted, this work is licensed under CC BY-ND 4.0 DE. Quotation permitted.



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI 1

DAFTAR SINGKATAN 4

BAB I PENDAHULUAN 5

A. LATAR BELAKANG 5

B. TUJUAN 6

C. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN 6

BAB II METODE PEMANTAUAN 6

A. METODOLOGI PEMANTAUAN 6

B. INDIKATOR PEMANTAUAN 8

BAB III PANDUAN PEMANTAUAN 10

A. LANGKAH PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON
HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC
TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) 10

BAB IV HASIL PEMANTAUAN 11

BAB V PENUTUP 51

A. KESIMPULAN 51

B. REKOMENDASI 52

DAFTAR SINGKATAN

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

HAM Hak Asasi Manusia

ICEL Indonesian Center for Enviromental Law

ICW Indonesia Corruption Watch

KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP Koalisi Pemantau Peradilan

KTP Kartu Tanda Penduduk

KY Komisi Yudisial

LBHM Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

LeIP Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan



DAFTAR SINGKATAN

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MA Mahkamah Agung

MaPPI FH UI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

Ormas Organisasi Masyarakat

PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

TII Transparency International Indonesia

YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap lembaga pengadilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah aparaturnya pengadilan. Temuan **Global Corruption Barometer 2020** yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan 34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan **World Justice Project (WJP ROL 2022)**—salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index—menunjukkan bahwa faktor civil justice di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional.

Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari survei nasional **Transparency International Indonesia (TII)** pada tahun 2022, setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa **praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan**. Hal ini ditunjukkan dengan temuan bahwa seperempat dari 1.200 responden di seluruh Indonesia pernah mengetahui bahkan menjadi korban praktik korupsi. Gratifikasi mendominasi, umumnya berupa permintaan uang, hadiah barang, atau diskon. Permintaan sejumlah uang oleh petugas pengadilan paling banyak dipersepsikan sebagai korupsi. Mayoritas responden menilai biaya di luar biaya resmi menyalahi aturan dan tidak wajar.

B. Tujuan

- 1. Melaporkan hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Agung oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP);*
- 2. Memberikan rekomendasi kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Hakim Agung yang dilakukan oleh KPP;*

PENDAHULUAN

Adapun temuan yang berkaitan langsung dengan Hakim yaitu, di antara semua petugas pengadilan, Hakim dinilai paling besar peluangnya untuk melakukan korupsi. Selain itu, pengambilan putusan diyakini sebagai tahapan yang paling berpotensi besar terjadi praktik korupsi. Wilayah (a) **diskresi putusan hakim, (b) administrasi perkara, serta (c) penetapan majelis hakim, putusan, dan eksekusi** dipersepsikan paling banyak memiliki redflag. Integritas penegak hukum, komitmen dalam pemberantasan korupsi, serta komitmen dalam mendukung reformasi peradilan masih menjadi pekerjaan rumah terkait dengan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang semakin tergerus.

Komisi Yudisial (KY) kembali melaksanakan rangkaian seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia (RI) yang dimulai pada 31 Agustus 2022. KY telah mengumumkan sejumlah nama Calon Hakim Agung yang lolos pada seleksi kualitas. Berkaitan dengan seleksi tersebut, **masyarakat sipil khususnya TII memandang perlu untuk turut terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap calon-calon hakim agar dapat menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan mendukung penuh reformasi peradilan.**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (uji kelayakan) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.” serta Pasal 17 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap para calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” memberikan gambaran bahwa **masyarakat memiliki kedudukan hukum untuk melakukan penelusuran rekam jejak dan pemantauan dalam rangka memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim.**

Dari hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak yang telah dilakukan oleh KPP, terdapat beberapa **catatan mengenai kepatutan calon dalam hal integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).**

C. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN

Pemantauan dilakukan kepada sebelas Calon Hakim Agung. Pemantauan untuk tiap Calon tidak dapat sama dari segi kedalaman dan keluasannya mengingat keterbatasan informasi, narasumber, dan atau sumber klarifikasi.

BAB II METODE PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan terhadap masing-masing Calon dengan melibatkan jurnalis ataupun mitra daerah melalui proses menggali rekam jejak Calon di daerah tempat bekerja Calon sebelumnya. Pemantauan dilakukan masyarakat secara kolektif dengan berbagai unsur masyarakat lainnya. Di dalam panduan ini, kelompok masyarakat yang aktif memantau proses seleksi disebut dengan *Tracker*.

Proses pemantauan yang dilakukan oleh pemantau meliputi:



No. 01 – Wawancara Narasumber

Melakukan penelusuran informasi primer dengan metode wawancara:

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.



No. 02 – Media Tracking

Melakukan penelusuran sekunder berbasis informasi dari website resmi pemerintah, kanal berita - media massa serta histori media sosial. Penelusuran memanfaatkan metode *social network analysis*



No. 03 – Analisa Putusan Pengadilan

Penelusuran dan analisis dokumen laporan kasus dan putusan pengadilan



No. 04 – Penelusuran LHKPN

Penelusuran dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs Komisi Pemberantasan Korupsi



No. 05 – Penelusuran Relasi Bisnis

Penelusuran dokumen bisnis/nama perusahaan dan posisi di perusahaan yang berkaitan dengan calon



No. 06 – Penelusuran Rekam Jejak Profesional

Penelusuran dokumen kinerja profesional di instansi/lembaga calon



METODE PEMANTAUAN

Kriteria Calon Hakim Agung (CHA) mengacu pada **Pasal 24A UUD 1945**: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak bercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dalam pemantauan ini, *Tracker* membagi indikator pemantauan menjadi empat aspek utama, yaitu: **integritas, independensi, kompetensi, dan perspektif Calon Hakim Agung (CHA) mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)**. Hal ini berdasarkan pada catatan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kriteria ideal CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, diantaranya sebagai berikut:

1. CHA yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor;
2. CHA yang tidak memiliki catatan integritas yang buruk;
3. CHA yang memiliki harta kekayaan yang wajar;
4. CHA yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan sesuai kamar perkara yang dipilih;
5. CHA yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung;
6. CHA yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum; serta
7. CHA yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Empat Aspek Utama Pemantauan:

- a. Integritas**
- b. Independensi**
- c. Kompetensi**
- d. Perspektif HAM**



INDIKATOR PEMANTAUAN

Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
-----------------	---------------	---------

1. INTEGRITAS

Kepatuhan Calon pada aspek integritas diukur berdasarkan pada kepatuhan administrasi, kepatuhan Calon terhadap hukum dan etika, serta data harta kekayaan Calon yang dinilai wajar atau tidaknya.

- a. Kepatuhan Administrasi
- b. Kepatuhan Hukum dan Etika
- c. Kepatuhan Pelaporan dan Kewajaran Harta Kekayaan

- Kelengkapan administrasi calon
- Kepatuhan perpajakan
- Kewajiban individu serta usaha yang dijalankan Calon
- Laporan etik
- Pelaporan penerimaan gratifikasi
- Laporan LHKPN

2. INDEPENDENSI

Kepatuhan Calon pada aspek independensi diukur berdasarkan pada aktivitas politik Calon, afiliasi Calon dengan organisasi masyarakat (ormas), afiliasi Calon dengan bisnis serta rekam jejak penanganan kasus dari Calon.

- a. Aktivitas Politik
- b. Afiliasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas)
- c. Afiliasi Bisnis
- d. Rekam Jejak Penanganan Kasus

- Keterlibatan calon dengan partai politik, sayap partai politik ataupun simpatisan
- Keterlibatan di Ormas baik di kepengurusan-keanggotaan maupun simpatisan
- Keterkaitan dengan dukungan finansial dari sektorprivat dan korporasi yang terlibat kasus korupsi



INDIKATOR PEMANTAUAN



Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
3. KOMPETENSI		
Kepatutan Calon pada aspek kompetensi diukur berdasarkan pada pengalaman pekerjaan Calon, prestasi yang relevan dari Calon terkait dengan kamar yang dipilih serta dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan, latar belakang akademis Calon, serta komentar/pendapat Calon di ruang publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengalaman Pekerjaan b. Prestasi c. Latar Belakang Akademis d. Komentar/Pendapat di Ruang Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam jejak dalam substansi hukum maupun manajerial perkara • Capaian terhadap agenda pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan • Rekam jejak produk akademis • Pandangan calon terkait isu hukum, reformasi peradilan, dan isu antikorupsi di media massa dan/ media sosial

4. PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)		
Kepatutan Calon dalam aspek mengenai perspektif HAM diukur berdasarkan pada beberapa sub aspek, diantaranya yaitu perspektif Calon mengenai gender dan orientasi seksual, dampak sosial, kelompok rentan dan minoritas, lingkungan serta pemidanaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Gender dan Orientasi Seksual b. Dampak Sosial c. Kelompok Rentan dan Minoritas d. Lingkungan e. Pemidanaan Hukuman Mati 	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas seperti misalnya KDRT, pelecehan seksual, dan informasi tentang poligami/poliandri • Pemahaman calon terhadap dampak sosial akibat tindak pidana korupsi • Toleransi calon terhadap kelompok rentan, keberagaman ras, budaya, dan agama • Keberpihakan keadilan lingkungan • Pandangan terhadap hukuman mati

BAB III PANDUAN PERTANYAAN

A. LANGKAH PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG OLEH MASYARAKAT SIPIL

1.

Sumber Informasi Utama

Narasumber, media dan lembaga yang bersangkutan

2.

Wawancara Narasumber

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.

3.

Sumber Informasi Sekunder

Tracker memasukkan sumber lain yang dianggap relevan

4.

Kompilasi Data

Tracker telah mencantumkan sumber informasi (media, hasil wawancara, atau sumber yang lain)

5.

Kerahasiaan Data

Tracker mencatat identitas narasumber: nama, instansi, jabatan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dan memastikan kerahasiaannya

6.

Validasi Data

Tracker telah menyertakan dokumen pendukung. Contoh: kliping atau tautan berita dari media massa/dokumen

7.

Imparsial

Tracker tidak melakukan wawancara dengan calon

8.

Kelengkapan Data

Waktu pelaksanaan tracking secara objektif dicantumkan



BAB IV HASIL PEMANTAUAN

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

A. Kamar Pidana

Nama	Achmad Dimiyati Rachmad Sulur, S.H.,M.H
Latar Belakang	Hakim Tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Temuan	Bukti Pendukung
Pada tanggal 12 Juni 2017 calon dilantik menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.	https://www.pt-bengkulu.go.id/struktur-organisasi/hakim-yang-pernah-bertugas-di-pengadilan-tinggi-bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/pengambilan-sumpah-pelantikan-hakim-tinggi-bapak-achmad-dimiyati-rachmad-sulur-sh-mh
Menjadi mediator pada kasus perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa, dengan kerugian Materil sebesar RP. 500.000.000,- dan kerugian Imateril sebesar RP. 1.000.000.000,-.Diketahui pada tanggal 18 - 02 - 2016 upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut belum menemukan titik temu keberhasilan. Oleh karenanya pengadilan menutup upaya perdamaian dan dilanjutkan melalui jalur litigasi.	Putusan Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.SMG
Calon selaku hakim anggota bersama-sama Hakim Ketua Lasito menjatuhkan hukuman mati pada perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.	Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2016/PN.SMG
Tidak ditemukan adanya LHKPN pada calon. Diperlukan klarifikasi lebih lanjut.	

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> • Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (2022) • Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru (2021) • Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta (2019) • Ketua Pengadilan Tinggi Medan (2018) • Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso (2016) • Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo (2010) • Hakim Pengadilan Negeri Negara (2000) • Hakim Pengadilan Negeri Palopo (1996) • Calon Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (1993) 	31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb; 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Riwayat Pendidikan Calon: <ul style="list-style-type: none"> • Univ. Naretama Surabaya S-2 • Universitas Jenderal Soedirman S-1 	https://www.ikahi.or.id/anggota/view/SDZzazAxbFp5eTNaRIQxWXU4M2FOTzU3OEhibWdiaHY1SDIwZEpQVnYrOD0=
Berdasarkan data laporan LHKPN, pada tanggal 31 Desember 2021. Total harta Calon sebesar Rp.668.482.367	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ atas nama Annas Mustaqim.

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Drs. Arifin, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
Temuan Bukti Pendukung	Temuan Bukti Pendukung
<p>Data Calon: NIP: 19600503 198804 1 001 Tempat/Tgl Lahir: Labuhanbatu, 03 Mei 1960 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama / IV.e</p> <p>Riwayat Pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Sulawesi Tenggara (2022) • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (2020) • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2018) • Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (2017) • Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang (2016) 	<p>https://pt-sultra.go.id/main/index.php/profil/2021-07-28-04-29-05/2021-02-08-17-39-36/wakil-ketua-pengadilan https://news.detik.com/berita/d-4955218/ketua-pn-jaksel-dipromosikan-jadi-hakim-tinggi-medan https://pn-gunungsitoli.go.id/berita/acara-bimbingan-dari-ketua-pengadilan-tinggi-medan-di-pengadilan-negeri-gunungsitoli https://www.pn-pekanbaru.go.id/beritadetil.php?module=beritadetil&id=227 http://www.pn-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/1065-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-wakil-ketua-pengadilan-negeri-palembang-bapak-drs-arifin-sh-m-hum</p>
<p>Berdasarkan data laporan LHKPN, pada tanggal 31 Desember 2021. Total harta Calon sebesar Rp.3.479.662.824</p>	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announatas nama Arifin.</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Ketua Pengadilan Negeri Gresik Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Barat Ketua Pengadilan Negeri Limboto 	https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/hakim-ad-hoc/8-profil-pegawai/476-profil-hakim-tinggi-dr-agustinus-purnomohadi-sh-m-h
Telah memiliki sertifikasi Tipikor	https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=564
Menulis Jurnal yang berjudul “Negating States Losses Approach On Punishment Of Corruption” yang berisikan pemidanaan terhadap kasus korupsi perlu juga memperhitungkan kerugian negara serta biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan atau menuntaskan suatu kasus korupsi. Sehingga membuat nilai kerugian negara menjadi sekecil-kecil atau sampai menjadi no/nihil.	http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/2994

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Jon Effreddi, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Riwayat Pekerjaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none">Menjadi Hakim sejak tahun 1996Merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang disumpah dan dilantik pada 29 Oktober 2021 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi PekanbaruPernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang dilantik pada tahun 2019Pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I A pada tahun 2017Pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pariaman hingga 2016Pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Karawang pada 2008	<ul style="list-style-type: none">Haluan 09 Desember 2012, https://issuu.com/haluan/docs/hln091212/13https://www.pn-bangkinang.go.id/?link=TampilDataBeritaPTDetail&kode=96&kode1=Pengambilan%20Sumpah%20dan%20Pelantikan%20Hakim%20Tinggi%20Pengadilan%20Tinggi%20Pekanbaru%20atas%20Nama%20Bapak%20Jon%20Effreddi,%20S.H.,%20M.Hhttps://site.pn-jambi.go.id/berita-terkini/berita/pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-ketua-pengadilan-negeri-jambi-tahun-2019http://www.pn-cilacap.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/815-sidang-luar-biasa-pengambilan-sumpah-pelantikan-dan-serah-terima-jabatan-ketua-pengadilan-negeri-cilacap-kelas-i-ahttps://padangpariamankab.go.id/2016/04/12/pisah-sambut-ketua-pengadilan-negeri-pariaman-jon-effreddi-sh-mh-kepada-admiral-sh-mh/https://adoc.pub/data-hakim-pengadilan-negeri-yang-sudah-bersertifikasi-tipik.htm
<p>Data Calon:</p> <ul style="list-style-type: none">Asal Ombilin Simawang, Kab. Tanah Datar Sumatera Barat.Lahir di Pekanbaru, 2 April 2964Informasi pada tahun 2013 menunjukkan riwayat keluarga Calon Hakim yaitu istri, Hj. Apedisnita, yang bekerja di Pemko Padang dan tiga orang anak. Anak tertua, Arrozaq Ave, mahasiswa Teknik Elektro ITB, kemudian Afida Razuna Ave, mahasiswi Kedokteran Unand dan bungsu, Rafi Muhammad Ave, pelajar SMP Azkia Padang.	<p>https://precitation31.rssing.com/chan-16006497/all_p3.html#c16006497a59?zx=813</p>
<p>Riwayat Pendidikan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none">SMAN 32 Jakarta (tamat tahun 1983)Sarjana, Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta (tamat tahun 1988)Pascasarjana Universitas Andalas (2004)	

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Jon Effreddi, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Harta Kekayaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none">Berdasarkan data yang dihimpun terdapat kenaikan harta kekayaan Calon Hakim Agung, sebanyak 15,8% dalam rentang tahun Juli 2018 - Desember 2021 dari total harta kekayaan sejumlah 4.874.582.015 menjadi Rp 5.644.724.674. Naik sebanyak Rp 770.142.659 dalam 3 tahun.	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#</p>
<p>Berita terkait Calon</p> <ul style="list-style-type: none">Pernah melantik dan mengambil sumpah Pimpinan DPRD Kab. Cilacap pada September 2019Pernah bergabung dengan tim pengawas pada Pengawasan, Pembangunan Zona Integritas dan Pendampingan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IAPernah menjadi ketua koordinator pengawas pada Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan internal di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA pada tahun 2018Pernah mengikuti berbagai diklat seperti:<ul style="list-style-type: none">Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Tingkat Pertama dan Banding Lingkungan Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Jawa Tengah pada tahun 2018Rapat Evaluasi Diklat I dan Magang I, bagi Tutor dan Mentor PCC Terpadu Di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia pada tahun 2018Pelatihan Penerapan Pasal Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia pada tahun 2018	<ul style="list-style-type: none">https://maspolin.id/2019/09/26/pimpinan-dprd-resmi-berganti-taufik-kita-akan-kebut-perda-tata-ruang/uncategorized/https://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=641:pengawasan-pembangunan-zi-dan-pendampingan-apm&catid=132:berita-terkini&Itemid=124https://pn-cilacap.go.id/images/laporan/LAPTAH_PN_CILACAP_2018.pdfhttps://pn-cilacap.go.id/images/laporan/LAPTAH_PN_CILACAP_2018.pdf

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Jon Effreddi, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Rekam Jejak Penanganan Kasus</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketika ditempatkan di Pariaman, Sumatera Barat telah banyak menangani permasalahan pembebasan lahan pembangunan yang diselesaikan dengan cepat• Analisis putusan hakim terhadap penerapan alat bukti• Kajian analisis pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pencurian (studi kasus pengadilan negeri jambi dan lembaga permasyarakatan Jambi)• Kajian putusan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang• Pernah menangani kasus narkoba• Pernah menangani kasus perampokan• Pernah menangani kasus kepemilikan sabu milik polisi di Padang	<ul style="list-style-type: none">• https://padangpariamankab.go.id/2016/04/12/pisah-sambut-ketua-pengadilan-negeri-pariaman-jon-effreddi-sh-mh-kepada-admiral-sh-mh/• http://repository.uinjambi.ac.id/14071/1/skripsi%20ama123.pdf• http://repository.uinjambi.ac.id/3160/1/QOMARIATUL%20KARIMAH-SHP162188.pdf• http://repository.uinjambi.ac.id/4917/1/SHP.151862_EKA%20KRISNA%20SEHATI_HUKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf• Koran Haluan, 30 April 2015, hlm. 2, https://vdocuments.mx/haluan-30-april-2015.html?page=2• https://busertransonline.wordpress.com/2010/12/17/perkaraperampok-atm-di-padang-mulai-disidangkan/• Haluan, 18 Juli 2017, hlm. 10-11) https://issuu.com/haluan/docs/hln180717
<p>Prestasi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pada saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA (2018) terdapat laporan penelitian terhadap pelayanan kepuasan masyarakat pada pengadilan tersebut yang pada intinya mengatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Cilacap sebesar 81,14 % dan berada pada kategori Baik.• Salah satu hakim yang telah mengikuti Diklat Tipikor pada 2008 dan telah memiliki sertifikasi tipikor.	<ul style="list-style-type: none">• https://pn-cilacap.go.id/images/IKM_2018.pdf• https://adoc.pub/data-hakim-pengadilan-negeri-yang-sudah-bersertifikasi-tipik.html

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. Joni, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar • Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2020 • Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • https://pn-surabayakota.go.id/ketua-pengadilan-negeri-surabaya/ • https://beritalima.com/dr-rudi-supermono-sh-mh-jadi-ketua-baru-pn-surabaya-simak-pesannya-melalui-humas/
Berita terkait Calon: <ul style="list-style-type: none"> • Telah lulus sertifikasi hakim niaga • PN Surabaya menerapkan sistem baru yaitu pengurusan administrasi kependudukan bisa diurus kecamatan dan kelurahan • PN Surabaya berhasil mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pelayanan publik terkait administrasi penduduk yang sangat membantu masyarakat tidak mampu, selain itu terdapat pula capaian yang menunjukkan pelayanan prima bagi pencari keadilan • Pernah menangani kasus Ratna Sarumpaet 	<ul style="list-style-type: none"> • https://docplayer.info/175787738-Data-hakim-pengadilan-negeri-yang-sudah-bersertifikasi-niaga-per-januari-2020.html • https://infosurabaya.com/administrasi-kependudukan-di-surabaya-kini-bisa-diurus-kecamatan-dan-kelurahan/ • https://realita.co/baca-6875-ini-prestasi-pengadilan-surabaya-selama-tahun-2021 • https://kabartangsel.com/ratna-sarumpaet-masih-enggan-bocorkan-saksi-sidang-pekan-depan/

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Dr. Margono, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
Temuan	Bukti Pendukung
Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none">Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi SemarangHakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Palu tahun 2018	
Berita terkait Calon: Calon pernah mengikuti diskusi publik memperkuat parameter perlindungan HAM dalam amandemen kedua UU ITE oleh Kementerian Kominfo RI pada tahun 2022	https://pn-semarangkota.go.id/web/dialogbersamakominfo/
Harta Kekayaan Calon: Antara Desember tahun 2021 dengan Desember 2020 terdapat kenaikan harta kekayaan Calon sebanyak 8,82% dari total harta kekayaan sejumlah Rp3.606.900.000 menjadi Rp 3.925.100.000. naik sebanyak Rp 318.200.000, dengan komponen perhitungan bebas dari hutang	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Marolop Simamora, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Riwayat Pekerjaan Calon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pengadilan Negeri Ketapang (Periode 2012-2014) • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Dilantik Tanggal 1 Juli 2021) • Ketua Pengadilan Negeri Jember (Dilantik 6 Mei 2020) • Wakil Ketua Pengadilan Tanjung Pinang (Dilantik 21 Maret 2017) • Ketua Pengadilan Negeri Binjai (13 juni 2016) 	<p>https://pn-ketapang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah</p> <p>https://pt-samarinda.go.id/2021/7/01/ketua-pengadilan-tinggi-kalimantan-timur-resmi-melantik-kedua-orang-hakim-tinggi-marolop-simamora-sh-mh-dan-djoni-witanto-sh-mh</p> <p>https://www.pt-surabaya.go.id/?p=7436</p> <p>https://batamtoday.com/tanjungpinang/read/87592/Marolop-Simamora-Resmi-Jabat-Waka-PN-Tanjungpinang</p> <p>https://www.pn-metro.go.id/news/index.php/berita/arsip-berita/22-pengumuman/849-pengantar-alih-tugas-wkpn-kasir-dan-panitera-pengganti-pengadilan-negeri-metro-dan-buka-puasa-bersama</p>
<p>Riwayat Pendidikan Calon: Universitas Lambung Mangkurat S2 Ilmu Hukum</p>	<p>https://www.ikahi.or.id/anggota/view/LzhBVXFPOGFLcG1TjJNOXhxd0ZnOVFrL0VJZ2luZHhpZWszem5hZ2VvVT0=</p>
<p>LHKPN Calon: Calon rutin melaporkan LHKPN sejak 2006 serta dalam data kenaikan nilai kekayaan calon terbilang wajar.</p>	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Marolop Simamora, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Aktivitas Politik Calon:</p> <p>Calon tidak terlihat dekat dengan anggota politik, hanya ada momen biasa bersama Anggota DPRD Bengkulu saat pelantikan</p> <p>Serta saat Calon menjabat Ketua PN Jember pernah mendapat apresiasi dari Mahkamah Agung atas program Pelayanan Bantuan Hukum Gratis yang berkolaborasi bersama Universitas Jember</p>	<p>https://bengkuluprov.go.id/resmi-dilantik-anggota-dprd-kota-bengkulu-periode-2019-2024-diminta-bersinergi-dan-kerja-profesional/</p> <p>https://news.detik.com/berita/d-5555220/ma-apresiasi-pelayanan-bantuan-hukum-gratis-pn-jember-kolaborasi-kampus-fh-unej</p>
<p>Rekam Jejak Penanganan Kasus:</p> <p>Calon pernah menjadi Ketua Majelis Hakim pada kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Komite Olah Raga Indonesia (KONI) Natuna 2011 sebesar Rp1,1 miliar dengan dua tersangka, Ir. Wahyu Nugroho dan Defri Edasa, akan digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang</p> <p>Kasus pungli dalam sewa menyewa kios yang dikelola PT. Tanjungpinang Makmur Bersama. Asep sebagai Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMD Tanjungpinang. Calon Hakim Agung Marolop yang saat itu Hakim Ketua menjatuhkan Hukuman 1 Tahun Penjara</p>	<p>https://kepri.bpk.go.id/5352/</p> <p>https://leadernusantara.com/majelis-hakim-vonis-mantan-dirut-bumd-tanjungpinang-1-tahun-penjara/</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Muhammad Damis, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pendidikan Calon: S2 Hukum Perdata UMI Makassar (2012)	https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/detail-profil-hakim-tinggi/622-profil-hakim-tinggi-muhammad-damis-s-h-m-h
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar (21 Januari 2022) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (24 Juni 2020) Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (09 Januari 2018) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar (16 Agustus 2017) Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa (08 Desember 2016) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa (18 Maret 2016) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar (29 November 2012) Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (17 September 2009) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (21 November 2008) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa (14 September 2005) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Barru (02 Agustus 2000) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sabang (01 Juni 1996) Staf Pengadilan Negeri Makassar (01 Mei 1994) Calon Hakim Pengadilan Negeri Makassar (01 Desember 1992) 	https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/detail-profil-hakim-tinggi/622-profil-hakim-tinggi-muhammad-damis-s-h-m-h
Calon membuat buku berjudul Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19	https://books.google.co.id/books?id=1E-HEAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=muhammad+damis,+s.h.,+m.h.&source=bl&ots=tI8dm7Khco&sig=ACfU3U2PrqKz_kFVFfpwwFV29LOmiu1rKw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjRrZzC26H7AhWhT2wGHRL6A-s4MhDoAXoEAcQA#wv=onepage&q=muhammad%20damis%2C%20s.h.%2C%20m.h.&f=false

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Muhammad Damis, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Calon banyak menangani kasus kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Bansos Sulawesi Selatan 2. Kasus korupsi Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara 3. Kasus Pinangki <p>Dalam kasus korupsi oleh Menteri Sosial ini, Calon pada saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat sorotan dari masyarakat karena perkataannya yang meringankan hukuman terdakwa Juliari Batubara karena sudah menderita dicaci oleh publik, sehingga menimbulkan kegaduhan publik.</p> <p>Calon memvonis Juliari Batubara 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, ganti rugi Rp14,5 miliar, dan tidak boleh duduk dalam jabatan publik selama empat tahun.</p>	<p>https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/24/profil-muhammad-damis-hakim-yang-sebut-juliari-batubara-cukup-menderita-dicaci-masyarakat</p> <p>https://serangnews.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1202461830/siapa-muhammad-damis-hakim-yang-sebut-juliari-batubara-menderita-karena-dicaci-masyarakat-ini-profilnya?page=2</p> <p>https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/profil-muhammad-damis-hakim-yang-vonis-juliari-hingga-pinangki?page=all</p>
<p>LHKPN Calon:</p> <p>Calon Hakim Agung Muhammad Damis rutin melaporkan yang dimulai pada tahun 2009. Nilai kekayaan Calon, naik pada tahun 2015 serta 2020</p>	<p>https://kumbanews.com/naik-drastis-segini-kekayaan-muhammad-damis-hakim-yang-vonis-eks-mensos-juliari-12-tahun/</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none">• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado (01 Agustus 2017)• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surakarta (06 Agustus 2015)• Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (23 Februari 2014)• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung (19 September 2012)• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda (25 Agustus 2008)• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup (01 Juni 2005)• Ketua Pengadilan Negeri Polewali (01 Maret 2004)• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali (01 Maret 2001)• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Polewali (12 Juni 1997)• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nabire (06 Agustus 1992)• Calon Hakim Pengadilan Negeri Palu (01 Juli 1989)• Calon Hakim Pengadilan Negeri Palu (01 Maret 1988)	<p>https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/detail-profil-hakim-tinggi/548-profil-hakim-tinggi-parulian-lumbantoruan-s-h-m-h</p>
Calon tercatat melaporkan dokumen e-LHKPN di tahun 2002, 2008, 2016 hingga 2021.	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/PreviewAnnoun/102622928
Calon merupakan anggota dari Tim Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar pada Pengadilan Negeri Pinrang dari tanggal 06 September 2022 s/d 07 September.	https://www.pn-pinrang.go.id/pnpinrang/index.php?option=com_content&view=article&id=580:akreditasi-penjaminan-mutu-oleh-tim-surveillance-pengadilan-tinggi-makassar&catid=29&Itemid=275
Calon pernah menyampaikan pendapat pada 24 Maret 2022 di web Pengadilan Tinggi Watampone. Calon berpendapat mewakili Pengadilan Tinggi Watampone bahwa memperhatikan kaum rentan.	https://www.pn-watampone.go.id/watamponev2/index.php/berita/berita-terkini?start=15

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023Disusun oleh: **Transparency International Indonesia**

Desember 2022

Nama	Paskatu Hardinata, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Temuan	Bukti Pendukung
Pengalaman Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none">• Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2019• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Tahun 2018• Ketua Pengadilan Negeri Sumber Tahun 2017• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Tahun 2016• Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2015• Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Tahun 2013• Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Tahun 2011• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Tahun 2009• Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tahun 2008• Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2005• Hakim Pengadilan Negeri Batam Tahun 2000• Hakim Pengadilan Negeri Kota Baru Tahun 1996• Cakim/PNS Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 1994• Cakim/CPNS Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 1992	https://pt-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/detail-profil-hakim-tinggi/2-uncategorised/558-profil-hakim-tinggi-paskatu-hardinata
Calon tercatat melaporkan dokumen e-LHKPN Calon di tahun 2001, 2008, 2016, 2018 hingga 2021.	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#
Dari 2 putusan yang ditelusuri, putusan yang dibuat Calon cenderung menyatakan dakwaan primer tidak terbukti secara sah dilakukan oleh terdakwa, sehingga mengarah pada dakwaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam mengadili, Calon cenderung memberikan hukuman diatas 5 tahun (7 tahun).	Putusan yang ditelusuri :Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN PlkPutusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Dari 2 putusan yang ditelusuri, Calon secara konsisten menetapkan uang pengganti bagi terdakwa.	Putusan yang ditelusuri :Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN PlkPutusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat dua media sosial milik calon (Instagram dan Facebook) namun tidak ditemukan unggahan status terkait dengan isu antikorupsi.	

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023Disusun oleh: **Transparency International Indonesia**

Desember 2022

Nama	Pasti Tarigan, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda
Temuan	Bukti Pendukung
Pengalaman Pekerjaan Calon : <ul style="list-style-type: none">• Ketua Pengadilan Negeri Ambon (2019 - 2020)• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (2017 - 2018)• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar (2008 - 2016)• Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar (23 November 2016 - 20 Oktober 2017)	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ https://pn-ambon.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=334:pisah-sambut-ketua-pengadilan-negeri-ambon-dari-pejabat-yang-lama-bapak-pasti-tarigan,-sh,-mh-kepada-pejabat-yang-baru-bapak-mateus-sukusno-aji,-sh,-mhum&catid=11&Itemid=430&lang=id https://pt-samarinda.go.id/statis/hakim-tinggi https://www.hetanews.com/article/112750/ketua-pn-siantar-pasti-tarigan-dimutasi-turun-jabatan
Dokumen e-LHKPN Calon di tahun 2008 dan 2016 hingga 2021 dapat ditelusuri dan diunduh di elhkpn.kpk.go.id	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ
Calon pernah menangani kasus korupsi Puskesmas Bunut pada tahun 2012 sebagai Ketua Majelis Hakim.	https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/06/02/2021/14143/terdakwa-korupsi-raskin-dituntut-55-tahun.html

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon : Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura (2010)	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#modal-announ
Dokumen e-LHKPN Calon di tahun 2010 dan 2017 hingga 2021 dapat ditelusuri dan diunduh di elhkpn.kpk.go.id	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#modal-announ
Calon pada saat tes Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung pada saat 23 Januari 2021 di Komisi III DPR RI berpendapat terkait hukuman mati bagi kasus koruptor dana bansos secara hukum bisa dilakukan apabila terbukti mengacu pada dakwaan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Tetapi persoalan rasa nurani terhadap hukuman mati, dilihat berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.	https://20.detik.com/detikflash/20210128-210128069/soal-hukuman-mati-koruptor-bansos-calon-hakim-agung-itu-boleh
Calon pada saat Wawancara Terbuka Calon Hakim ad hoc Tipikor di MA berpendapat dalam rangka pemberantasan korupsi kita harus membuat putusan yang layak dengan semua hakim menerapkan hal tersebut, maka upaya hukum banding akan berkurang. Bukan saja penambahan hakim yang diperlukan tetapi juga kualitas hakimnya harus dapat menerapkan hukum yang baik dan berkeadilan, agar dapat menjatuhkan hukum yang layak bagi pelaku.	https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1371/calon-hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma-petrus-paulus-maturbongs-tak-hanya-ditambah-kualitas-sdm-hakim-perlu-ditingkatkan

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Dr. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Pengalaman Pekerjaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas 2009 • Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2011 • Hakim Pengadilan Negeri Bandung 2015 • Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 2016 • Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 2017 • Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 2017 • Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung 2018 • Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin 2020 • Hakim Pengadilan Tinggi Banten 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 180/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 570/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 306 /Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1479/Pid/B/2011/PN.Jkt.Sel. • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 599/Pdt.G/ARB/2013/PN.Jkt.Sel. • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 606/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. • Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. • Putusan PN BANDUNG 85/Pdt.P/2015/PN.BDG. • PT BANDUNG Nomor 392/PID/2021/PT BDG. • Putusan PT BANJARMASIN Nomor 94/PDT/2020/PT BJM • Putusan PN SEMARANG 445/Pid.Sus/2016/PN Smg • Putusan PN SEMARANG 01/Arbitrase/2016/ PN.Smg • Putusan PT BANTEN 208/PDT/2022/PT BTN • Putusan PT BANTEN 5/PID.SUS-Anak/2022/PT BTN • Putusan PT BANTEN 132/PID.B/LH/2021/PT BTN • Putusan PT BANTEN 228/PDT/2021/PT BTN
<p>Berdasarkan penelusuran terhadap putusan yang berhasil diunduh dari Direktori putusan MA dimana Calon terlibat sebagai hakim ketua, secara umum Calon memiliki pemahaman yang bagus terkait Tipikor dan cukup sistematis dalam membangun argumentasi hukum. Calon menggunakan Pasal 3 UU Tipikor karena terdakwa memiliki jabatan sebagai penyelenggara negara. Dalam putusan tersebut Calon membuat putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tipikor. Calon juga memberikan sanksi tambahan (memperberat dari putusan pengadilan tingkat pertama) berupa penjara 3 tahun dari yang awalnya 1 tahun 8 bulan dan denda yang besarnya Rp250.000.000 dari yang awalnya Rp50.000.000</p>	<p>Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM Tanggal 23 Juni 2020</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. Siti Suryati, S.H., M.H, M.M.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
Temuan	Bukti Pendukung
Calon menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, dan belum ditemukan putusan dari Calon yang mencabut hak politik.	
<p>Pandangan Calon terkait hukuman mati cukup normatif. Dalam FPT Hakim AdHoc Tipikor MA di DPR, 2020, Calon menyatakan bahwa hukuman mati boleh dijatuhkan karena telah diatur demikian, meski penjatuhannya turut melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.</p> <p>Pada saat proses seleksi tersebut, Calon juga menyusun Makalah berjudul Perspektif Vonis Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pada DPT di KY sebelumnya, Calon juga menyampaikan bahwa yang penting dalam penerpana hukuman mati adalah pembuktiannya.</p>	<p>https://20.detik.com/detikflash/20210128-210128069/soal-hukuman-mati-koruptor-bansos-calon-hakim-agung-itu-boleh https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-23-f47e9d2898405bcc94ef23f54262457.pdf</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Sukri Sulumin, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none">• Calon pernah menjabat sebagai• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda• Ketua Pengadilan Negeri Cilacap• Ketua Pengadilan Negeri Banyumas• Ketua Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB	
Calon pernah menyampaikan pendapat dalam berita online untuk berkomitmen menghilangkan korupsi, KKN dan gratifikasi, sehingga pengadilan akan mendapat kepercayaan dari publik yang lebih luas.	"Persidangan kita laksanakan secara online berbasis IT, untuk informasi persidangan juga bisa diakses melalui online, sehingga bisa dilihat SITP di dalamnya tentang proses perkara di Pengadilan Negeri Cilacap, tentang surat keterangan, penyitaan online, pengeledahan dan penahanan online bisa diakses semua dengan beberapa aplikasi yang kita luncurkan," jelasnya. Ditambahkan, katanya di Pengadilan Negeri Cilacap juga menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dan tidak lagi masuk ke dalam ruangan. Karena Hakim juga disediakan ruang terbuka untuk menerima tamu. https://serayunews.com/ciptakan-sejarah-kejari-dan-pengadilan-negeri-cilacap-canangkan-wilayah-bebas-korupsi/
Calon pernah memutuskan agar terdakwa Korupsi dialihkan penahanannya yang semula tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan kota karena mempertimbangkan kondisi kesehatan dan psikologi terdakwa dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dokter yang berada di Rutan Gorontalo dan dokter spesialis kandungan terkait kondisi kehamilan terdakwa yang sudah berusia 6 bulan dan Lembaga Pemasarakatan (LP) belum memiliki penanganan khusus terkait orang hamil.	https://hargo.co.id/berita/hamil-6-bulan-jadi-tahanan-kota/
Calon pernah memutus perkara putusan nomor 153/PDT/2022/PT SMR pada 3 November 2022 yang isinya menolak dan merevisi berkas banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding. Dalam putusan ini, uang ganti kerugian materiil sebesar Rp 175 juta per bulan sejak aset lahan itu kemudian dikenakan penerapan uang paksa sebesar Rp 125 juta per aset dan dikuasai PT Duta Manuntung.	https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/3107842/pengadilan-tiga-lahan-yang-dikuasai-zainal-milik-pt-duta-manuntung
Calon pernah menyampaikan pendapat dalam berita online bahwa Jaksa Dan Hakim Bersama Membangun Zona Integritas Humas Pemkab Cilacap	http://kisahsekolah.web.id/

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Dr. Suprapti, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none">• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang• Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang• Ketua Pengadilan Negeri Solo• Ketua Pengadilan Negeri Tabanan• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung	
Calon pernah menyampaikan pendapat dalam berita online untuk berjanji dalam mengemban tugas barunya di Kabupaten Tabanan, tidak akan pernah menyalahgunakan wewenang untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum seperti, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena jika terbukti secara meyakinkan melanggar hukum, dirinya siap dihukum seberat-beratnya. "Saya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan etika profesi. Jika saya melanggar saya siap dihukum seberat-beratnya,"	https://pn-tabanan.go.id/2013/09/02/selamat-atas-dilantiknya-ibu-suprapti-sh-mh-sebagai-ketua-pn-tabanan-yang-baru/
Calon dalam putusan lima aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang yang tersangkut kasus korupsi dana bantuan sosial dijatuhi hukuman penjara 14 bulan di mana vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 1,5 tahun menggunakan Pasal 3 UU Tipikor.	https://nasional.kompas.com/read/2015/11/18/22492131/artikel-video-kgmedia.html?page=all

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Waspin Simbolon, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Pengalaman Pekerjaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu (2019-2021)• Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (2018)• Hakim Pengadilan Negeri Jawa Barat (2016)• Hakim Pengadilan Negeri Medan (2014-2015)	Dilansir berdasarkan catatan e-LHKPN dan berita-berita
<p>Calon tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp. 2.003.900.000 pada tahun 2021 dan jumlah tersebut tidak berubah secara signifikan setiap tahunnya yaitu berkisar kurang lebih Rp. 100.000.000.</p>	https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1368/calon-hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma-rodjai-s-irawan-hakim-harus-menjaga-pergaulan
<p>Beberapa Putusan yang diputus oleh calon sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu seperti Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL menguatkan putusan pengadilan negeri yang menghukum terdakwa penjara atas tindak pidana korupsi.</p> <p>Calon pernah menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan pada 2020 saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Palu karena terdakwa mengunggah komentar yang berisikan penghinaan kepada Wali Kota Palu di media sosial. (Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/2020/PT PAL) Calon pernah menjatuhkan hukuman penjara bagi produsen video porno yang melibatkan anak di bawah umur selama 7 tahun penjara pada 2018 saat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.</p> <p>Calon saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan pernah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi bandar sabu mantan polisi pada 2015. Saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, calon pernah menjatuhkan penjara 16 bulan bagi terdakwa yang melakukan penyalan ilegal satwa liar pada 2014.</p>	<p>https://nusantara.medcom.id/jawa-barat/peristiwa-jabar/lKYELQWK-otak-pembuat-video-porno-anak-divonis-7-tahun-penjara</p> <p>https://www.thejakartapost.com/news/2015/01/14/former-police-officer-gets-life-drugs.html</p> <p>https://www.profauna.net/en/content/illegal-wildlife-dealer-spend-16-months-jail#.Y2tS0OxBw-Q</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

B. Kamar Perdata

Nama	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Pengalaman Pekerjaan Calon Hakim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1992) CPNS/Cakim Pengadilan Negeri Magelang; • (1994) PNS/Cakim Pengadilan Negeri Malang; • (1996-2000) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ende; • (2000-2006) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang; • (2006-2009) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pacitan; • (2009-2011) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klaten; • (2011-2014) Hakim Yustisial Kapaniteraan Mahkamah Agung; • (2014-2016) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang; • (2016-2016) Ketua Pengadilan Negeri Gresik; • (2016-2017) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda; • (2017-2018) Ketua Pengadilan Negeri Sleman; • (2018-2018) Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan; • (2015-2016) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar; • (2018-2020) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; • (2020-Sekarang) Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. 	<p>https://badilum.mahkamahagung.go.id/96-profil-pejabat/profil-pejabat-eselon-ii/direktur-pembinaan-tenaga-teknis-peradilan-umum.html</p>
<p>Riwayat Pendidikan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya • S2 Humaniora Universitas Merdeka Malang • S1 Hukum Keperdataan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 	<p>Data IKAHI</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none">• Advokat/Pengacara Praktek (1996-2010);• Pengurus LBH;• Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1992-sekarang).	https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/ProfileUmumHakimTindakPidanaKorupsi.pdf
Riwayat Pendidikan Calon: Formal <ol style="list-style-type: none">1. SD Karya Toboali Tahun 19802. SMPN I Toboali Tahun 19833. SMAN 1 Pangkal Pinang Tahun 19864. SI Hukum UGM Tahun 19925. S2 Ilmu Hukum UNDIP Semarang Tahun 19996. S3 Ilmu Hukum UNPAD Bandung (disertasi) Informal <ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan Hakim Tipikor oleh Mahkamah Agung	https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/ProfileUmumHakimTindakPidanaKorupsi.pdf
Calon Hakim Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum. tercatat pernah menangani Persidangan Kasus Korupsi, pada Perkara : <ul style="list-style-type: none">• 06/Pid.Sus/2011/P.Tipikor Yk (18/10/2011) dengan terdakwa Paeno Bin Kardji Sohtono• 03/Pid.sus/2011/P. Tipikor Yk (13-6-2011) dengan terdakwa Gunadi Wibowo bin Ismadi Sumarno• 10/Pid.Sus/2011/P.Tipikor Yk (20/12/2011) dengan terdakwa Joko Ibnu Muhamad Bachroen	https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/ProfileUmumHakimTindakPidanaKorupsi.pdf
Calon tercatat pernah menulis Karya Ilmiah berjudul Aspek-Aspek Hukum dalam Praktik. Marihot Jan Pieter Hutajulu, Penerbit UKSW, 2009	https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/ProfileUmumHakimTindakPidanaKorupsi.pdf

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

C. Kamar Agama

Nama	Dr. Abd. Hakim, S.H, M.HI.
Latar Belakang	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Riwayat Pekerjaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hakim/Ketua Pengadilan Lubuk Basung (2008) • Hakim Tinggi Pengadilan Agama Palembang (2016) • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang (2018) • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (2019) • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (2020-2021) • Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (2022-sekarang) 	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/announ/#announ</p> <p>https://www.pta-bengkulu.go.id/seputar-peradilan/1074-pelantikan-bapak-dr-drs-abdul-hakim-m-h-i-sebagai-wakil-ketua-pta-padang</p>
<p>Calon tercatat melaporkan kekayaannya pada tahun 2008, 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan pada tahun 2008 sebesar Rp106.911.000. • Kekayaan pada tahun 2016 sebesar Rp654.835.334. • Kekayaan pada tahun 2018 sebesar Rp983.842.754. • Kekayaan pada tahun 2019 sebesar 1.316.285.039. • Kekayaan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.548.579.792. • Kekayaan pada tahun 2021 sebesar 1.661.559.532. 	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/announ/#announ</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023**Disusun oleh: Transparency International Indonesia****Desember 2022**

Nama	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H.
Latar Belakang	Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none">• Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya• Praktisi hukum dan bisnis sejak tahun 1995 hingga sekarang. Pada tahun 2019.• Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Law Firm di Surabaya.• CPNS Pengadilan Agama Selat Panjang 1991• PNS Pengadilan Agama Selat Panjang 1992• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Tanjung Pinang 1994• Wakil Ketua Pengadilan Agama Natuna 2004• Wakil ketua Pengadilan Agama Batam 2007• Wakil ketua Pengadilan Agama Bengkulu 2008• Ketua Pengadilan Agama Kota Malang 2010• Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2013• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan 2015• Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya 2018• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar 2019• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 2020• Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2021• Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda 2022	https://lecturer.uinsby.ac.id/index.php/example/detaildosen/1120 http://pta-samarinda.go.id/index.php/component/content/
Calon tercatat melaporkan dokumen e-LHKPN sejak 2021	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/announ/#
Calon aktif mengisi forum-forum ilmiah, seminar dan lokakarya baik tingkat regional maupun nasional diantaranya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Seminar Anti Korupsi yang secara rutin diselenggarakan oleh ICON RI (Indonesian Investigation Corruption Republic of Indonesia)	https://lecturer.uinsby.ac.id/index.php/example/detaildosen/1120
Calon melakukan pembinaan kepada para perwakilan masing-masing PA serta motivasi dalam peningkatan Pembangunan Zona Integritas. Fokus Pembinaan kali ini adalah tentang upaya dan komitmen bersama dalam peningkatan penyelesaian perkara, oleh karena itu KPTA Samarinda juga menyampaikan Hasil Rilis SIPP masing-masing satker daerah beserta evaluasinya.	https://pta-samarinda.go.id/berita-pta/1296-kpta-samarinda-lakukan-pembinaan-kepada-seluruh-pa-sewilayah-hukum-pta-samarinda-14-04-2022

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. H. Insyafli, M.H.I
Latar Belakang	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Riwayat Pekerjaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sejak bulan September 2018 s.d April 2020. • Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara April 2020 • Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 	<p>https://www.pa-sanggau.go.id/berita-pta-pontianak/3-hal-yang-cukup-menghibur-dr-drs-h-insyafli-m-h-i-selama-bertugas-di-pontianak</p> <p>http://pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=618</p> <p>https://pn-tanjungselor.go.id/id/berita/berita-terkini?start=48</p>
<p>Calon rutin melakukan lapor e-LHKPN Calon sejak 2006 sampai 2021, namun terdapat beberapa tahun yang tidak ditemukan laporannya mulai dari 2006 dan 2008. Kemudian dilaporkan kembali di tahun 2014 sampai dengan 2021</p>	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/announ/#announ</p>
<p>Calon melakukan Penandatanganan MoU secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr. A. Yuspahrudin, Bc.IP., S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dr. H. Insyafli, M.H.I. . Adapun poin kesepakatan yang tertuang di dalam MoU meliputi kerja sama dengan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.</p>	<p>https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/informasi/indeks-berita/2064-kanwil-kemenkumham-jateng-teken-mou-dengan-pengadilan-tinggi-agama-yogyakarta</p>
<p>Calon aktif dalam memberikan pemaparan materi pendaftaran, pemberitahuan dan pengangkatan sita. Dan bimbingan teknis kejurusitaan diisi oleh narasumber Dr. H. Insyafli, M.H.I. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan materi eksekusi dan permasalahannya.</p>	<p>https://pa-tais.go.id/seputar-peradilan/534-tenaga-kejurusitaan-pa-tais-ikuti-bimbingan-teknis</p>
<p>Calon beserta Hakim Tinggi Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. dan tim Hatibinwasda (Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah) rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB.</p>	<p>http://www.pa-argamakmur.go.id/seputar-peradilan/622-tim-hatibinwasda-pta-bengkulu-lakukan-pembinaan-dan-pengawasan-di-pa-arga-makmur-kelas-ib</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. Drs. Nurul Huda, S.H., M.H
Latar Belakang	Hakim Tinggi BALITBANGDIKLATKUMDIL Mahkamah Agung RI
Temuan	Bukti Pendukung
Calon tercatat sebagai Hakim Tinggi pada PTA Jambi yang dilantik pada 29 Juli 2020. Sebelumnya, Calon tercatat sebagai Askor Kamar Agama, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.	https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pta-jambi-laksanakan-pelantikan-dua-hakim-tinggi-baru
Calon tercatat sebagai Hakim Yustisial pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan berdasarkan SK KMA No. 62/KMA/SK/IV/2021	https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/profil-id/struktur-organisasi-id.html
Calon tercatat melaporkan LHKPN pada tahun 2021	https://www.pajogjakarta.go.id/article/lhkpn-dan-lhkasn-tahun-2021
Calon tercatat aktif dalam penyusunan naskah akademik sertifikasi Hakim Jinayah.	https://uinsby.ac.id/informasi/berita/dosen-fakultas-syariah-dan-hukum-uinsa-turut-serta-dalam-fgd-penyusunan-naskah-akademik-sertifikasi-hakim-jinayah

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. H. Syaifuddin, S.H., M. Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Calon tercatat pernah menyampaikan pendapat tentang perbedaan benturan kepentingan dan gratifikasi. Menurutnya, Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Sebagai contoh ketika seorang hakim dalam menangani perkara mempunyai kepentingan atas proses perkara yang diperiksanya sehingga putusannya tidak sesuai dengan yang semestinya.</p> <p>Sedangkan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang tambahan (fee) atau hadiah, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, dengan contoh ketika seorang pimpinan mendapat gratifikasi sebagai ucapan terima kasih dari bawahan atas promosi jabatan atau mutasi ke daerah yang diinginkan.</p>	<p>https://pa-seirampah.go.id/index.php/berita/berita-pa-sei-rampah/803-pa-sei-rampah-ikuti-sosialisasi-benturan-kepentingan-dan-gratifikasi</p>
<p>Pelopor Sertifikasi ISO 9001:2008 teriain Pembangunan Zona Integritas</p>	<p>https://sumut.bawaslu.go.id/2022/03/18/strategi-jitu-pembangunan-zona-integritas-di-bawaslu-se-provinsi-sumatera-utara/</p>
<p>Calon menyampaikan pentingnya pemahaman terkait gratifikasi karena banyak pejabat yang menerima gratifikasi tanpa sadar dan berlangsung cukup lama.</p>	<p>https://pa-kabanjahe.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/52-berita-pta-medan/1240-pta-medan-sosialisasikan-benturan-kepentingan-dan-gratifikasi-ke-pa-secara-virtual</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

D. Kamar Tata Usaha Negara

Nama	Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Riwayat Jabatan Struktural Calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (2012) • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan (2016) • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (2017) 	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ</p>
<p>Calon mulai mencatatkan harta kekayaannya mulai tahun 2008 dan dilanjutkan di tahun 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Tidak ditemukan LHKPN Calon pada tahun 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, dan 2015.</p> <p>Adapun total harta kekayaan per tahun adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2008: Rp.1.806.709.886 • 2012: Rp.3.486.230.608 • 2016: Rp.5.145.953.280 • 2017: Rp.6.512.821.346 • 2018: Rp.7.139.459.681 • 2019: Rp.8.483.240.517 • 2020: Rp.8.706.217.996 • 2021: Rp.9.320.085.397 	<p>https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ</p>
<p>Calon aktif menghadiri berbagai acara peringatan hari-hari nasional maupun acara bertema hukum. Beliau juga muncul di akun youtube NAWACITA TV dan menjadi pembicara.</p>	<p>https://mimbarbangsa.co.id/peringati-sumpah-pemuda-ke-94-disiplin-manoa-berharap-pemuda-nisel-bangkit-membangun-bangsa/ https://buanametro.com/hakim-tinggi-pttun-jakarta-dr-disiplin-manoa-s-h-m-h-d-th-berbagi-pengalaman-kepada-insan-pers-pewarna-banten/ https://www.pelitatoday.com/2021/11/diapr-esiasi-rakerda-pewarna-dpd-banten.html</p>
<p>Calon menghadiri Nawacita Award bersama Menteri Hukum dan HAM, Bpk. Prof. Yasonna H Laoly, SH.,M.Sc, Ph.D, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Bpk. Prof. Dr. Anwar Usman, SH.,MH, Mantan Bupati Kab. Nias Bpk. Sokhiatulo Laoly</p>	<p>Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)</p>

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
Temuan	Bukti Pendukung
Menjadi moderator dalam acara “Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”	https://www.ptun-tanjungpinang.go.id/webinar-kontrol-yudisial-terhadap-penyalahgunaan-wewenang-badan-danatau-pejabat-pemerintahan-pasca-undang-undang-cipta-kerja/
<p>Menerbitkan buku berjudul, “Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” dengan sinopsis berikut:</p> <p>“Unsur menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan species delict dari unsur melawan hukum, sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik/pemerintah. Delik menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Buku ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan penulis, mengenai studi hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi.”</p>	https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/ptun-jakarta/index.php?p=show_detail&id=74
<p>Calon sering menghadiri acara bantuan sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Sosial kepada Anak Tunanetra Indonesia di Yayasan Elsafan. Calon merupakan Ketua MPO Fornisel kepada Dr. Anan Silviana (Pembina Yayasan Elsafan) • Penyaluran Bansos Fornisel bagi Masyarakat Nisel di Jabodetabek yang terkena program PSBB • Penyerahan Bantuan Posko IKAHI Peduli Banjir kepada Ketua PTUN Jakarta, Dr. hari Sugiarto 	Sosial Media (Instagram: Disiplin Manao)
Calon menghadiri kegiatan syukur HUT Suara Owo Nias yang ke 5 Th di Hotel Swiss Bell Kemayoran - Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/22)	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023Disusun oleh: **Transparency International Indonesia**

Desember 2022

Nama	Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
Temuan	Bukti Pendukung
Calon menghadiri pelantikan DPW PPN Riau dan DPC PPN Kota Pekanbaru. "PPN adalah organisasi kepemudaan asal Nias yang berdiri pada tahun 2017. Secara pribadi saya kenal dengan Organisasi pemuda ini yang kebetulan juga saya diminta sebagai penasehat." Tanggal: 23 Mei 2022	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Calon melakukan kegiatan gowes bersama dengan Ketum Fornisel Bpk. Brigjen Pol. Drs. Bahagia Dachi.,SH., MH, Wasekum Fornisel Be'esokhi Ndruru dan beberapa tim Gowes Ono Niha (GON) Tanggal: 21 Mei 2022	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Calon menghadiri pelantikan DPW PPN Riau dan DPC PPN Kota Pekanbaru. "PPN adalah organisasi kepemudaan asal Nias yang berdiri pada tahun 2017. Secara pribadi saya kenal dengan Organisasi pemuda ini yang kebetulan juga saya diminta sebagai penasehat." Tanggal: 23 Mei 2022	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Calon menghadiri acara pelantikan BPL DPP Forum Nias Selatan, Hotel Oasis, Jakarta Pusat bersama Bpk Brigjen Pol. Drs. Bahagia Dachi.,SH. MH mendampingi Bpk Prof. Yasonna H Laoly Tanggal: 14 Mei 2022	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Calon menghadiri webinar dan acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Penerus Bangsa Webinar Nasional dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke 93 tahun dengan topik Pemuda Unggul dan Bersinar: Tanggal 30 Oktober 2021 Calon merupakan Pembina Yayasan	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Calon memberikan ucapan selamat kepada Brigjen. Pol. Drs. Bahagian Dchi, S.H., MH. sebagai Ketua Umum Fornisel Periode 2021-206	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Secara umum, calon memiliki concern terkait narkoba dan menghadiri webinar atau seminar terkait narkoba	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)
Dalam kasus sengketa TUN terkait jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung Antara Benny Bachtiar (penggugat) dengan Wali Kota Bandung (Tergugat). Calon memenangkan Wali Kota Bandung.	Sosial Media (Facebook: Disiplin F. Manao)

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Latar Belakang	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
Temuan	Bukti Pendukung
Calon lahir di Malang, 08 Mei 1963 berkiprah di bidang peradilan sejak tahun 1988 menjajaki sebagai Calon Hakim Departemen Kehakiman Instansi Luar. Yang kemudian sejak tahun 1996 s.d. sekarang berkecimpung di lingkup Tata Usaha Negara baik sebagai Hakim Tingkat Pertama hingga sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara pada 2019.	https://ditjenmiltun.net/index.php/en/profil-sp-1667677503/profil-pejabat/1-dirjen-badilmiltun
Calon menegaskan komitmennya untuk meningkatkan integritas jajaran hakim agar terhindar dari perbuatan korupsi dengan membangun sistem di peradilan supaya terjaga integritasnya dan terus memonitor perilaku hakim, lakukan pembinaan, juga berikan contoh teladan, bagaimana harus berperilaku yang baik sesuai keinginan pencari keadilan.	https://m.radaronstop.co/read/40445/Ketika-Hakim-Terima-Suap-Dengarnya-Bikin-Miris-Aja https://www.republika.co.id/berita/rkusdu328/hakim-jadi-penegak-hukum-paling-banyak-terjerat-korupsi
Adapun dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim TUN baik pada tingkat pertama dan banding berdasarkan website https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ (Direktori Putusan) ditemukan 44 data putusan yang amarnya yaitu, Gugur 1; Kabul 8; Membatalkan 4; menguatkan 6; Tidak dapat diterima 3; Tolak 8; dan Lain-lain 14 putusan.	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Lulik+Tri+Cahyaningrum%22
Calon tercatat melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2008, 2009, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

E. Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

Nama	Dr. Eddhi Sutarto, S.IP., SH., MH., CLA
Latar Belakang	Advokat Konsultan Management and Lawfirm Eddhi Sutarto and Partner
Temuan	Bukti Pendukung
Calon tercatat mengajar di beberapa perguruan tinggi, tepatnya tahun 1988, pada tahun 2000 pengangkatan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang pelantikannya dilaksanakan di Kopertis V Jawa Tengah. Calon juga mengajar di STAN, di Universitas Indonesia (D-3 dan S-2), Universitas Kristen Indonesia (Program Magister Ilmu Hukum) dan di Semarang, serta menjadi pembimbing dan penguji peserta program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang.	Blog pribadi Calon http://eddhi-sutarto.blogspot.com/
Calon tercatat pernah mengikuti seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018	https://www.hukumonline.com/berita/a/16-calon-hakim-mk-lolos-administrasi--pansel-cari-sosok-negarawan-lt5b1e6e132664d/?page=2
Calon tercatat pernah mengikuti seleksi Calon Hakim Agung pada tahun 2016. Pada sesi wawancara, Calon menyorot mengenai kurang maksimalnya pembinaan dan pengawasan terkait integritas dari Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim-hakim di bawahnya.	https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/186/cha-eddhi-sutarto-ma-diminta-tingkatkan-integritas-dalam-pembinaannya
Calon tercatat pernah mengisi materi mengenai Hukum Kepabeanan dalam Praktik pada seminar yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Semarang	https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-0468961/peradi-bekali-advokat-ilmu-kepabeanan

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Disusun oleh: Transparency International Indonesia
Desember 2022

Nama	Dr. Ruwaidah Afiyati, SE, SH, MM, MH., CFrA.
Latar Belakang	Hakim Pengadilan Pajak
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pekerjaan Calon: Calon tercatat pernah menjabat sebagai Auditor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta 1985 - 2015	https://www.linkedin.com/in/ruwaidah-afiyati-ruru-73a42b74/
Riwayat Pendidikan Calon: <ul style="list-style-type: none"> • STAN Diploma III, Akuntansi 1982 - 1985 • STIE Swadaya Jakarta, Sarjana Ekonomi, Akuntansi dan Keuangan 1992 - 1994 • STIE IPWIJA Jakarta, Magister Manajemen (MM), Manajemen Keuangan 2004 - 2006 • Universitas Borobudur, Sarjana Hukum (SH), Ilmu Hukum 2011 - 2015 • Universitas Borobudur, Magister Hukum (M.H.), Hukum Bisnis 2011 - 2013 • Universitas Brawijaya, Program Doktor Ilmu Hukum 2015 	https://www.linkedin.com/in/ruwaidah-afiyati-ruru-73a42b74/details/education/
Calon tercatat pernah mengikuti seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2014.	https://pt-palembang.go.id/images/tpk2.pdf

REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Disusun oleh: Transparency International Indonesia

Desember 2022

Nama	Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak,CA., M.M., M.Hum.
Latar Belakang	Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
Temuan	Bukti Pendukung
Riwayat Pendidikan Calon: Menyelesaikan S3 di Universitas Padjajaran	https://www.linkedin.com/in/triyono-martanto-b38049124/?originalSubdomain=id
Pendapat mengenai karakteristik putusan pajak: Dalam temuan ini didapatkan bahwa Calon mengemukakan pendapatnya terkait putusan hakim mengenai pajak. Calon mengungkapkan bahwa ia ingin menciptakan putusan yang konsisten atau tidak disparitas. Hal ini guna tidak membingungkan masyarakat di kemudian hari.	https://news.ddtc.co.id/cha-khusus-pajak-triyono-martanto-ingin-tekan-disparitas-putusan-pajak-38725
LHKPN Calon rutin melaporkan LHKPN sejak 2016 hingga 2021. Di beberapa tahun sebelumnya secara tidak teratur, juga melaporkan hartanya. Terdapat kenaikan signifikan atas harta kekayaan Calon, di tahun 2020 hartanya tercatat sebanyak Rp.19.806.171.625. dan di tahun 2021 menjadi sebanyak Rp.51.202.526.173	https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ
Riwayat Pekerjaan Calon: Sebelum diangkat menjadi Hakim Pengadilan Pajak, Calon menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak. Diangkat menjadi Hakim Pengadilan Pajak pada 20 Maret 2015. Kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo nomor 30/P Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022.	https://setpp.kemenkeu.go.id/profilpimpinan/Details/7
Calon pernah diduga melakukan plagiat dalam makalahnya ketika melakukan uji kelayakan pada proses seleksi Calon Hakim Agung di tahun 2021 di Komisi III DPR RI.	https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-f1ec23180165494b7609cb0b71c6474b.pdf https://nasional.kompas.com/read/2021/01/27/13564661/makalah-calon-hakim-agung-triyono-martanto-diduga-plagiat-saat-seleksi-dpr https://nasional.tempo.co/read/1427213/dituding-plagiat-ini-kata-calon-hakim-agung-ke-anggota-dpr https://www.suara.com/news/2021/01/27/150509/makalah-calon-hakim-agung-triyono-diduga-plagiat-komisi-iii-hentikan-rapat

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komisi Yudisial telah mengumumkan sejumlah nama Calon Hakim Agung yang lulus pada tahap seleksi kualitas untuk mengisi sebelas posisi Hakim Agung yang dimintakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun sejumlah Calon yang lulus pada tahap seleksi tersebut, diantaranya 17 orang di Kamar Pidana, 2 orang di Kamar Perdata, 5 orang di Kamar Agama, 2 orang di Kamar Tata Usaha Negara, dan 3 orang di Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak).

Dari hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil, **terdapat sejumlah catatan yang perlu untuk diperhatikan oleh Komisi Yudisial mengenai kepatutan calon dalam aspek integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM),** diantaranya yaitu:

01

Muhammad Damis, S.H., M.H.,

Calon tercatat pernah menjadi Hakim Ketua ketika penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Juliari Batubara. Calon memvonis Juliari Batubara 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, ganti rugi Rp14,5 miliar, dan tidak boleh duduk dalam jabatan publik selama empat tahun. Putusan tersebut menuai sorotan dan kegaduhan publik karena Calon beranggapan bahwa ia meringankan hukuman terdakwa Juliari Batubara karena sudah menderita dicaci maki oleh publik akibat kasus korupsi tersebut.

02

Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., CA., M.M., M.Hum.,

Tercatat pernah diduga melakukan plagiat dalam makalahnya ketika melakukan uji kelayakan pada proses seleksi Calon Hakim Agung di tahun 2021 di Komisi III DPR RI.

BAB V PENUTUP

B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan yang sudah diuraikan serta beberapa catatan terkait dengan rekam jejak Calon Hakim Agung, masyarakat sipil meminta kepada Komisi Yudisial untuk memperhatikan lebih lanjut terhadap Calon yang memiliki rekam jejak yang buruk serta memiliki catatan yang kurang dalam hal integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Komisi Yudisial juga perlu untuk mendorong Calon Hakim Agung yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung, Calon Hakim Agung yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan, Calon Hakim Agung yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum, dan Calon Hakim Agung yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Sejumlah aspek ini penting untuk menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan mendukung reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung.



Nilai Hakim Agung Ideal:

- a. Integritas**
- b. Independensi**
- c. Kompetensi**
- d. Perspektif HAM**

Transparency International Indonesia

Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807

Email: info@ti.or.id

Website: ti.or.id

Instagram: [@tiindonesia](https://www.instagram.com/tiindonesia)

YouTube: [@Transparency International Indonesia](https://www.youtube.com/Transparency International Indonesia)

Facebook: [@Transparency International Indonesia](https://www.facebook.com/Transparency International Indonesia)

Twitter: [@TIIndonesia](https://twitter.com/TIIndonesia)

